



Tindaklanjuti Temuan BPK

PONTIANAK. Setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hasil temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat dipidana.

Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 9 tahun 2009 (Permenpan 9/2009) pada point f menyebutkan, setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan BPK, dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 26 UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Terungkap di acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan semester II tahun 2014 dari BPK-RI Perwakilan Kalbar kepada pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten (Pemkab), dan pemerintah kota (Pemkot) se-Kalbar. Bertempat di Aula BPK-RI Perwakilan Kalbar.

Agenda yang dilaksanakan BPK-RI Perwakilan Kalbar ini salah satu potret dari keberhasilan maupun kelemahan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Kalbar, dalam melaksanakan program dan kegiatan. Guna mencapai visi dan misi sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

Beberapa upaya telah dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI dimaksud, dengan membuat rencana aksinya walau bersumber dari Pra-LHP. Seperti menginstruksikan kepada para pimpinan SKPD untuk segera menindaklanjuti, serta mengingatkan kembali baik secara lisan maupun tertulis dalam merespon perkembangan secara berkelanjutan. Selalu mengikuti perkembangan BPK-RI dan temuan lainnya, termasuk temuan yang berpotensi kerugian daerah atau negara.

Wagub juga berpesan kiranya kegiatan yang telah dilakukan BPK ini, mampu memberikan motivasi yang lebih dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ke arah yang lebih baik lagi. Kepala BPK-RI Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satrio menjelaskan penyerahan LHP BPK-RI Semester II Tahun 2014, merupakan amanah pasal 23 E ayat 2 UUD 1945, pasal 18 ayat 1 UU 15/2004 dan pasal 6 ayat 1 UU 15/2006.

Disampaikannya pula hasil pemeriksaan semester II tahun 2014 ini, akan mendukung pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan segera dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan.

Didi berharap agar temuan-temuan yang ada dapat segera ditindaklanjuti. Mengingat demi baiknya tata kelola keuangan daerah dan demi menghindari financial distress di masa yang akan datang. "Kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah bisa memengaruhi terhadap penilaian BPK-RI atas penyajian keuangan pemerintah daerah," tuturnya. (lud)